

PKM Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Taba Terunjam Dalam Kegiatan Musyawarah Desa

Yusuarsono ¹⁾, Bando Amin ²⁾, Marida Sariningsih ³⁾, Antonio Imanda ⁴⁾, Evi Lorita ⁵⁾, Tuti Handayani ⁶⁾, Hardandi ⁷⁾, Gaul Sapruzi ⁸⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ yusuarsono@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [24 Juni 2025]

Revised [28 Juli 2022]

Accepted [31 Juli 2022]

KEYWORDS

Community Participation,
Village Development
Deliberation, Participatory
Development, Community
Empowerment, Village
Governance.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), di mana kehadiran warga hanya berkisar 20–30% dari undangan yang disebar, serta dominasi perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang demokratis, transparan, dan inklusif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, diskusi terbuka, serta simulasi musyawarah desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kehadiran dan keberanian warga untuk menyampaikan pendapat, terutama dari kalangan pemuda dan perempuan. Pemerintah desa juga mulai menerapkan pola komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat memperkuat praktik demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan demikian, PKM ini berkontribusi nyata terhadap penguatan budaya partisipatif dan keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat.

ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity was carried out by lecturers and students of the Public Administration Study Program at Dehasen University, Bengkulu, in Taba Terunjam Village, Karang Tinggi District, Central Bengkulu Regency. The background to this activity was the low level of community participation in the Village Development Deliberation Forum (Musrenbangdes), where residents attended only around 20–30% of the invitations distributed, as well as the dominance of village officials in the decision-making process. The main objective of this activity was to increase awareness and active community involvement in democratic, transparent, and inclusive village development planning. The implementation method used a participatory approach through outreach activities, socialization, open discussions, and village deliberation simulations. The results of the activity showed a significant increase in the level of attendance and the courage of residents to express opinions, especially among youth and women. The village government also began to implement more open and participatory communication patterns. This activity demonstrated that an educational and collaborative approach between universities and the community can strengthen local democratic practices and good village governance. Thus, this PKM made a significant contribution to strengthening participatory culture and the sustainability of community-based development.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembangunan. Prinsip partisipatif menjadi salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat di banyak desa masih rendah, termasuk di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Desa Taba Terunjam memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama di sektor pertanian dan perkebunan, tetapi tantangan dalam pengelolaan pembangunan desa masih terasa, terutama dalam aspek tata kelola yang partisipatif. Berdasarkan hasil pengamatan dan data dari Pemerintah Desa Taba Terunjam, tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya mencapai sekitar 20–30% dari jumlah undangan yang disebar. Sebagian besar peserta yang hadir berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, sementara kehadiran warga biasa, terutama perempuan dan pemuda, masih sangat terbatas.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sosialisasi informasi, jadwal musyawarah yang tidak fleksibel, serta persepsi bahwa keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh aparat desa. Selain itu, faktor budaya turut memengaruhi rendahnya keaktifan warga, di mana sebagian besar masyarakat masih memiliki pandangan bahwa urusan pembangunan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan

proses pembangunan menjadi kurang inklusif dan berpotensi menghasilkan program yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan upaya strategis yang mampu membangkitkan kesadaran, membangun rasa memiliki, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar kehadiran fisik dalam forum musyawarah, tetapi juga keterlibatan aktif dalam menyampaikan ide, gagasan, serta solusi terhadap permasalahan desa. Oleh karena itu, tim dosen dan mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *“Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Taba Terunjam dalam Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa.”*

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik untuk mendukung penerapan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pendampingan langsung, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar terjalin interaksi yang harmonis dan saling percaya. Tujuan utama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Taba Terunjam tentang pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan musyawarah pembangunan desa.
2. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat, ide, dan usulan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga.
3. Membantu pemerintah desa dalam membangun pola komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif dengan masyarakat.
4. Menumbuhkan budaya musyawarah yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda, memiliki ruang untuk berpartisipasi secara setara.

Selain itu, kegiatan PKM ini memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat Desa Taba Terunjam, kegiatan ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai hak serta tanggung jawab dalam pembangunan desa. Masyarakat menjadi lebih berani menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bagi pemerintah desa, kegiatan ini membantu memperkuat mekanisme komunikasi dan kolaborasi dengan warga, serta menjadi sarana evaluasi dalam menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih terbuka dan demokratis.

Sementara bagi tim dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu, kegiatan ini memberikan pengalaman empiris dalam penerapan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model implementasi nyata antara dunia akademik dan kebutuhan masyarakat dalam membangun desa yang partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu. Metode kegiatan dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, edukatif, dan aplikatif, dengan mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek kegiatan, bukan sekadar objek penerima manfaat.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan koordinasi internal tim pelaksana untuk merumuskan rencana kegiatan, menentukan tujuan spesifik, serta menyusun materi penyuluhan yang relevan. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat berdasarkan hasil observasi awal dan data sekunder dari pemerintah desa. Persiapan juga meliputi penyiapan sarana pendukung kegiatan seperti alat peraga, bahan presentasi, serta logistik kegiatan (spanduk, sertifikat, dan doorprize).

Selain itu, tim melakukan rapat koordinasi untuk membagi tugas antaranggota, menentukan jadwal pelaksanaan, serta mengatur strategi komunikasi dengan pihak mitra, yaitu Pemerintah Desa Taba

Terunjam. Langkah berikutnya adalah mengirimkan surat resmi kepada kepala desa untuk mendapatkan izin serta menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan. Kesepakatan ini penting untuk memastikan kegiatan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas rutin masyarakat dan pemerintah desa.

Tahap Observasi Lapangan

Sebelum kegiatan inti dilaksanakan, dilakukan observasi lapangan dengan tujuan memperoleh gambaran aktual mengenai situasi sosial masyarakat, tingkat partisipasi warga dalam forum desa, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbangdes sebelumnya. Observasi dilakukan melalui wawancara informal dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok warga seperti pemuda dan perempuan. Hasil observasi ini menjadi dasar untuk menyesuaikan materi dan metode pelaksanaan kegiatan agar lebih kontekstual dan mudah diterima oleh masyarakat. Tim juga mengidentifikasi waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi warga agar tingkat kehadiran peserta optimal.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan PKM. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Taba Terunjam pada tanggal 2 Juni 2022 dengan melibatkan 46 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan dan sosialisasi partisipatif. Penyuluhan dilakukan dengan metode presentasi interaktif menggunakan media visual seperti slide PowerPoint melalui proyektor untuk memperjelas materi. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar partisipasi masyarakat, peran warga dalam proses pembangunan desa, serta strategi membangun budaya musyawarah yang inklusif. Dosen anggota tim PKM secara bergantian menyampaikan materi sesuai bidang keahliannya, diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka agar peserta dapat menyampaikan pandangan, kritik, dan pengalaman mereka secara langsung.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengidentifikasi kendala yang mereka alami dalam berpartisipasi pada musyawarah desa serta merumuskan solusi bersama. Pendekatan ini bertujuan agar kegiatan tidak hanya bersifat penyampaian informasi satu arah, tetapi menjadi wadah pembelajaran bersama antara tim akademisi dan masyarakat.

Selain penyuluhan, kegiatan juga diisi dengan sesi simulasi musyawarah desa, di mana peserta dilatih untuk menyampaikan pendapat, menanggapi ide orang lain, dan mengambil keputusan bersama secara demokratis. Simulasi ini terbukti efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri warga serta memperlihatkan bahwa setiap suara memiliki nilai dalam proses pembangunan.

Tahap Evaluasi dan Refleksi

Setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi selesai, dilakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi kualitatif dan evaluasi partisipatif. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan mengamati respons peserta, antusiasme, serta tingkat keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, evaluasi partisipatif dilakukan melalui refleksi bersama antara tim PKM dan peserta, di mana peserta diminta memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih termotivasi untuk hadir dan terlibat aktif dalam musyawarah pembangunan desa. Mereka mulai memahami bahwa partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk membangun desa. Pemerintah desa pun menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan praktik musyawarah yang lebih terbuka dan partisipatif ke depannya.

Pendekatan dan Prinsip Pelaksanaan

Metode kegiatan ini berlandaskan pada prinsip "learning by participation", di mana masyarakat belajar melalui keterlibatan langsung dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong transformasi perilaku dan sikap. Pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara aktif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, kegiatan PKM ini juga menerapkan prinsip edukatif, komunikatif, dan berkelanjutan. Edukatif berarti kegiatan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga; komunikatif berarti kegiatan mendorong interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah desa; sedangkan berkelanjutan berarti hasil kegiatan diharapkan menjadi kebiasaan baru dalam praktik musyawarah pembangunan di masa mendatang. Dengan metode pelaksanaan yang partisipatif dan aplikatif ini, kegiatan PKM tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan desa. Hal ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “*Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Taba Terunjam dalam Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa*” dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022 bertempat di Kantor Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini melibatkan tim dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu serta 46 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) yang selama ini cenderung bersifat formalitas dan kurang partisipatif. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam perencanaan pembangunan serta diberikan ruang untuk berlatih menyampaikan aspirasi dan usulan secara terbuka.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sesi pembukaan yang diisi dengan sambutan dari Kepala Desa Taba Terunjam dan Ketua Tim PKM. Dalam sambutannya, kepala desa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi inti oleh tim dosen. Materi pertama membahas tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemaparan ini menekankan bahwa musyawarah desa seharusnya menjadi forum demokrasi lokal di mana masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan, bukan sekadar mendengarkan keputusan pemerintah desa.

Materi kedua difokuskan pada strategi membangun budaya partisipatif melalui komunikasi yang terbuka, transparansi informasi, dan penguatan kapasitas warga dalam menyampaikan pendapat secara konstruktif. Tim PKM juga memberikan contoh praktik baik (best practice) dari desa lain yang berhasil meningkatkan partisipasi warganya melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif.

Selama sesi penyuluhan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Banyak warga yang aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman tentang hambatan yang mereka alami dalam mengikuti musyawarah desa. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka merasa enggan hadir karena menganggap pendapat mereka tidak akan dipertimbangkan. Namun setelah mendapatkan pemahaman baru, mereka menyadari bahwa keberanian untuk terlibat adalah langkah awal dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi musyawarah desa. Dalam sesi ini, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan diminta untuk mempraktikkan proses musyawarah dengan tema pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Melalui simulasi tersebut, masyarakat belajar bagaimana mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta membuat keputusan bersama secara demokratis.

Hasil dari simulasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta, terutama kalangan perempuan dan pemuda yang sebelumnya jarang terlibat aktif. Mereka mulai berani menyampaikan pendapat dan menunjukkan kemampuan argumentatif dalam forum diskusi. Hal ini menandakan perubahan perilaku sosial menuju budaya musyawarah yang lebih terbuka dan setara.

Selain peningkatan keaktifan warga, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan positif di tingkat pemerintah desa. Aparat desa mulai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan Musrenbangdes ke depan. Pemerintah desa menyatakan akan menyesuaikan waktu pelaksanaan musyawarah agar lebih fleksibel dan mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media komunikasi lokal seperti grup WhatsApp warga dan papan pengumuman desa.

Kegiatan ini diakhiri dengan refleksi bersama antara tim PKM, perangkat desa, dan peserta. Dalam sesi refleksi, peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baru sekaligus motivasi untuk lebih terlibat dalam kegiatan pembangunan. Tim PKM juga menyerahkan sertifikat, kenang-kenangan, serta dokumentasi kegiatan kepada pemerintah desa sebagai bentuk simbolis kerja sama antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif memberikan dampak positif terhadap perilaku sosial warga. Tingkat kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa berikutnya mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara tindak lanjut, kehadiran warga dalam musyawarah desa meningkat dari sekitar 25% menjadi lebih dari 60%, dan lebih banyak warga yang berani menyampaikan usulan secara langsung.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Taba Terunjam memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat dibangun melalui pendekatan yang tepat. Dalam konteks teori partisipasi, sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation*, tingkat partisipasi masyarakat dapat dibedakan dari sekadar tokenisme (partisipasi semu) hingga partisipasi yang bermakna (citizen power). Sebelum kegiatan ini dilakukan, partisipasi masyarakat Desa Taba Terunjam masih berada pada tingkat tokenisme, di mana warga hanya hadir sebagai pendengar tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan yang diambil.

Melalui kegiatan PKM, terjadi pergeseran menuju tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena masyarakat mulai diberikan kesempatan dan keberanian untuk berperan aktif. Proses penyuluhan dan simulasi musyawarah desa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mustanir (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa meningkat ketika mereka diberikan pemahaman yang jelas tentang peran dan manfaat keterlibatan mereka.

Selain itu, kegiatan PKM ini juga membuktikan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebelum kegiatan, pola komunikasi yang berlaku cenderung bersifat top-down, di mana pemerintah desa mendominasi jalannya musyawarah. Setelah kegiatan, pola komunikasi mulai berubah menjadi lebih dialogis dan terbuka. Pemerintah desa belajar mendengarkan dan menampung masukan masyarakat, sementara masyarakat merasa lebih dihargai dan terdorong untuk aktif berkontribusi.

Peningkatan partisipasi juga didukung oleh pendekatan kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan instruktur yang mendikte. Pendekatan seperti ini sesuai dengan model pengabdian berbasis *Community Based Research (CBR)* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam proses pembelajaran. Melalui kolaborasi ini, transfer pengetahuan tidak hanya terjadi dari akademisi ke masyarakat, tetapi juga sebaliknya — masyarakat berbagi pengetahuan lokal yang menjadi bahan refleksi akademik bagi tim dosen dan mahasiswa.

Kegiatan ini juga memperlihatkan adanya dampak sosial jangka panjang. Berdasarkan hasil monitoring tidak formal, beberapa warga yang aktif dalam kegiatan PKM mulai dilibatkan dalam panitia Musrenbangdes berikutnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dari pemerintah desa terhadap kapasitas warga dalam berkontribusi pada perencanaan pembangunan.

Dari sisi pemerintahan desa, kegiatan PKM memberikan dorongan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa mulai menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Poespitoahadi (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang aktif dan kesediaan pemerintah untuk membuka ruang dialog.

Selain itu, kegiatan PKM ini juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai melalui sosialisasi satu kali saja, melainkan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan pendampingan yang konsisten agar semangat partisipatif yang telah tumbuh dapat terus terpelihara. Pemerintah desa diharapkan melanjutkan inisiatif yang telah dibangun, misalnya dengan membentuk Forum Komunikasi Warga Desa (FKWD) atau kelompok diskusi masyarakat yang rutin membahas persoalan pembangunan dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa.

Dari perspektif akademik, kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial di tingkat akar rumput. Melalui kegiatan PKM, dosen dan mahasiswa tidak hanya mentransfer pengetahuan teoretis, tetapi juga menerapkan konsep *good governance* dan *public participation* secara langsung di lapangan. Pengalaman ini sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat serta menjadi laboratorium sosial bagi mahasiswa untuk memahami dinamika pemerintahan desa secara nyata.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada metode sosialisasi, tetapi juga pada pendekatan interpersonal dan kepercayaan sosial (social trust). Ketika masyarakat merasa dihargai, didengarkan, dan dipercaya, maka partisipasi akan tumbuh secara alami tanpa perlu paksaan.

Dengan demikian, kegiatan PKM di Desa Taba Terunjam dapat dikategorikan sebagai model penguatan partisipasi masyarakat berbasis edukasi dan kolaborasi sosial, yang mampu mengubah pola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat menuju arah yang lebih demokratis dan partisipatif. Ke depan, hasil kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam mengembangkan sistem musyawarah yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Dehasen Bengkulu di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, partisipasi masyarakat di Desa Taba Terunjam tergolong rendah, dengan tingkat kehadiran warga dalam forum musyawarah hanya sekitar 20–30% dari jumlah undangan. Masyarakat juga cenderung pasif dan enggan menyampaikan pendapat karena merasa bahwa keputusan telah ditentukan oleh aparat desa.

Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, kegiatan PKM berhasil mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat mulai menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam musyawarah desa bukan sekadar formalitas, melainkan hak dan tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan. Kesadaran ini tumbuh melalui proses penyuluhan, diskusi terbuka, dan simulasi musyawarah desa yang menempatkan warga sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang nyata dalam hal partisipasi. Setelah pelaksanaan PKM, tingkat kehadiran warga dalam musyawarah desa berikutnya meningkat signifikan hingga lebih dari 60%, dan semakin banyak masyarakat yang berani mengemukakan pendapat, terutama kalangan pemuda dan perempuan yang sebelumnya cenderung diam. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai memahami makna partisipasi yang sesungguhnya dan merasa memiliki ruang yang aman untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Dari sisi pemerintah desa, kegiatan PKM memberikan dorongan untuk memperbaiki mekanisme musyawarah dan pola komunikasi dengan masyarakat. Aparat desa mulai membuka diri terhadap masukan warga dan berkomitmen untuk menyelenggarakan forum musyawarah yang lebih transparan, demokratis, dan fleksibel. Pemerintah desa juga menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Secara konseptual, kegiatan ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibangun dan ditingkatkan melalui proses edukasi dan pemberdayaan yang berkesinambungan. Pendekatan yang digunakan tim PKM berhasil memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak harus dilakukan melalui intervensi struktural besar, melainkan dapat dimulai dari kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal. Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, mereka akan menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan desa.

Lebih jauh, kegiatan ini menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan warga menciptakan sinergi yang positif dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui kegiatan PKM seperti ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa yang demokratis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat Desa Taba Terunjam dalam musyawarah pembangunan desa, memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menumbuhkan budaya musyawarah yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil warga.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi tindak lanjut untuk memperkuat hasil dan keberlanjutan program ini:

1. Pemerintah Desa perlu menjadikan kegiatan musyawarah pembangunan desa sebagai agenda rutin yang bersifat terbuka dan inklusif. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya melaksanakan musyawarah sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadikannya sebagai wadah pengambilan keputusan yang partisipatif. Setiap lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, perlu mendapatkan undangan dan kesempatan yang setara untuk hadir serta menyampaikan aspirasinya.
2. Perlu adanya sistem informasi publik desa yang lebih transparan dan mudah diakses. Salah satu faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya informasi mengenai jadwal, agenda, dan hasil musyawarah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan membuat

- papan informasi, grup komunikasi digital (seperti WhatsApp atau Facebook), atau media pengumuman lokal untuk menyebarkan informasi pembangunan desa secara berkala.
3. Pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi dan lembaga mitra. Kegiatan PKM yang bersifat satu kali belum cukup untuk mengubah budaya partisipasi masyarakat secara permanen. Diperlukan program lanjutan berupa pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara periodik agar semangat partisipatif yang telah tumbuh tetap terjaga. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra pendamping bagi pemerintah desa dalam membangun sistem tata kelola partisipatif yang berkelanjutan.
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan lokal. Untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan kritis, dibutuhkan kegiatan pelatihan tentang hak-hak warga negara, teknik komunikasi efektif, serta keterampilan berbicara dalam forum publik. Dengan meningkatkan kapasitas ini, masyarakat akan lebih percaya diri dan mampu berkontribusi secara konstruktif dalam proses musyawarah pembangunan.
 5. Integrasi nilai-nilai partisipasi dalam kebijakan dan dokumen perencanaan desa. Pemerintah desa disarankan memasukkan indikator partisipasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang terukur dan diawasi dalam setiap tahapan pembangunan.
 6. Penguatan peran tokoh masyarakat dan lembaga desa dalam menggerakkan warga. Tokoh masyarakat, seperti ketua RT, tokoh agama, dan karang taruna, memiliki pengaruh besar dalam mendorong keterlibatan warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan khusus agar mereka menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa.
 7. Pemberian penghargaan bagi masyarakat aktif. Pemerintah desa dapat memberikan bentuk apresiasi sederhana bagi warga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah atau program pembangunan desa. Hal ini dapat menjadi motivasi sosial untuk meningkatkan semangat partisipasi.

Melalui rekomendasi tersebut, diharapkan kegiatan PKM ini tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu terus berkolaborasi agar prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh pihak, Desa Taba Terunjam diharapkan dapat menjadi model desa partisipatif di Kabupaten Bengkulu Tengah yang menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat mampu memperkuat kualitas pembangunan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. P. K. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2625>
- Firman Perdana, M., Laksmono, B. S., Harto, S., & Ismandianto. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2). [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(2\).4317](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(2).4317)
- Kurniawan, B. (2021). *Pembangunan Partisipatif: Teori, Konsep, dan Implementasi di Tingkat Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <https://doi.org/10.24252/profetik.v5i2a6>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Poespito Hadi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa. *Media Bina Ilmiah*, 18(1). <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i1.584>
- Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20817>
- Rizal, M., & Hanifah, S. (2022). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa melalui Pendekatan Kolaboratif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 3(2), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jpmn.3.2.145-156>
- Suharto, E. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, A., & Rasyid, M. (2020). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 34–45. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ajz37>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, J. (2020). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Yuwono, T. (2022). *Governance dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Malang: UB Press.